

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN JEMBER DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Dwi Putra Prayoga
110110160037

Kurang efektifnya penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kabupaten Jember mengakibatkan terhambatnya akses bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan sebuah pelayanan hingga terbit suatu kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Kebijakan ini mewajibkan segala pelayanan baik perizinan maupun non perizinan dilaksanakan secara terpadu dan melalui media online agar dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan sebaik mungkin. Adanya Online Single Submission sebagai basis pelayanan melalui media online masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Belum ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga kebijakan tersebut masih dianggap kurang efektif untuk diberlakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu beserta implementasi peraturan daerah yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran tentang sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam kaitannya dengan adanya Online Single Submission sebagai wadah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi terhadap pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem Online Single Submission yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan yang dialami oleh instansi-instansi pelaksana dan juga masyarakat yaitu masalah koordinasi beserta sarana prasarana yang belum memadai. Pada akhirnya, pengaturan penyelenggaraan pelayanan masih belum bisa efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan platform yang ada beserta pemerintah yang masih gagap teknologi dan kurangnya sosialisasi mengenai Online Single Submission, padahal hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi ketentuan tersebut.

Kata Kunci: OSS, Pelayanan, Pemerintahan

ABSTRACT
JURIDICIAL REVIEW OF THE ONLINE SINGLE SUBMISSION
IMPLEMENTATION IN ONE-STOP INTEGRATED SERVICES AT
JEMBER IN ACTUALIZE THE GOOD GOVERNANCE

Dwi Putra Prayoga
110110160037

The ineffective implementation of both permit and non-permit services in Jember Regency has resulted in limited access for the government and the public to avail various services, leading to the issuance of a policy known as Regent Regulation Number 19 of 2021 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Working Procedures of the Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Jember Regency. This policy mandates that all services, whether permit or non-permit related, must be carried out in an integrated manner and through online platforms to facilitate public access and improve service delivery. However, the Online Single Submission (OSS) system, as the basis for online services, has not been fully perceived by the public. The lack of proper coordination between the government and the public hampers the effective implementation of this policy.

This research adopts a normative juridical approach, utilizing data related to the integrated one-stop services and the implementation of local regulations concerning the matter. The results of the research are presented descriptively and analytically, providing an overview of the one-stop service system in relation to the existence of the Online Single Submission as a platform for the implementation of integrated one-stop services.

The study indicates that the implementation of the integrated one-stop service through the Online Single Submission system specified in Regent Regulation Number 19 of 2021 in Jember Regency has not been carried out as expected. This is due to various obstacles experienced by implementing agencies and the public, such as coordination issues and inadequate facilities. Ultimately, the organization of service delivery remains ineffective because of the lack of public awareness in utilizing the available platform and the government's technological shortcomings. There is also a lack of socialization regarding the Online Single Submission, even though it is crucial to support the smooth implementation of the provisions.

Keywords : OSS (Online Single Submission), Services, Governance.